

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: LaksBang.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. hlm. 109.
- Astomo. P. 2021. *Ilmu Negara*. Raja Grafindo: Depok.
- Atmosudirdjo. P. 1994. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Kesowo. 2021. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 55.
- Citra Umbara. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Press Indo. hlm. 31.
- Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 198.
- Fandy Tjiptono. 2015. *Strategi Pemasaran*. Edisi IV. Yogyakarta:Grafika Media. hlm. 97.
- Fajlurrahma Jurdi. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Gibson JL JM Invancevich dan JH Donnelly. 2001. *Organisasi*. terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga. hlm. 120.
- Hadiwijoyo. S. 2021. *Pelayanan publik berbasis Regional Complex Analysis*. RajaGrafindo Persada: Depok.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. . Yogyakarta:Gava Media. hlm. 56–57.
- Hadjon. P. M. 1993. *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media. hlm. 39.
- Hayat 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. Kharisma Putra Utama: Depok.
- Ismail. Nusrhasan. 2021. *Kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 45-62
- I Juniarso Ridwan. 2020. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.hlm. 32
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Bunga Media. hlm. 43.
- Iwan Satibi. 2012. *Manajemen Publik Dalam Perspektif teori dan empirik*. Bandung:Universitas Pasundan Press. hlm. 30.
- John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press. Cambridge. hlm. 60–65.
- Kesowo. B. 2021. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm. 86.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 156.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Niko Trisusilo. 2024. *Komunikasi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Melalui Media Sosial Di Polda Sumatera Barat*. hlm. 27.
- OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 354–357.
- Philipus. M. Hadjon. 1987. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. hlm. 53–55.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 112–114.
- Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 41.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sinambela, 2016, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers. R. M. 1985. *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press. hlm. 62-63.
- Sondang P. Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 24.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2021. *Pelayanan publik berbasis Regional Complex Analysis*. Raja Grafindo Depok: Persada. Hlm. 61.
- Utrecht. E. 1986. *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wahyu Prawesthi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: LaksBang Pressindo. hlm. 171.

Jurnal Ilmiah

- A. Bau Inggit, Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Jurnal Restorative Justice. Fakultas Hukum UNHAS. Vol. 3 No. 1 , 2019. hlm. 6
- Dwight Waldo. 1948. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*, Ronald Press Company, New York, hlm. 38–40.
- Fitria, F., & Irianto, S. 2025. Analysis of rejection of trademark registration due to substantial similarities in trademarks. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 45–62.
- Khasna, S., & Yuliani, I. 2024. Transformasi digital pendaftaran merek: Menilai kualitas, efisiensi, dan tantangan pelayanan bagi UMKM di Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 210–228.

- Masnun, M. A., Prasetyo, D. E., Awang, M. B., & Sulistyowati, E. 2024. Reconstructing Indonesia's trademark registration system through the lens of general principles of good governance to realize substantive justice. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), 601–620.
- Max Weber, 1978, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Vol. I, University of California Press, Berkeley, hlm. 956–958.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Governance for Sustainable Human Development*, UNDP Policy Document, New York. hlm. 9–10.
- Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt. 2011 *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe. New York. hlm. 13–15.
- Jan Michiel Otto, 2010, *An elementary approach to the rule of law*. Leiden University.
- James E. Crimmins. 2011. Bentham's Principle of Utility and the Reform of Law. *Utilitas*. Vol. 16. No. 3. hlm. 311–327.
- Lathif, Nazaruddin. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law review)* 3.1. hlm. 85.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *What is Intellectual Property?*, WIPO Publication No. 450(E), Geneva, hlm. 10–12.
- Zayanti Mandasari, 2022, *Implementasi Pendekatan Citizen's Charter terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik*, Bappenas Working Papers, Vol. 5 No. 3, hlm. 2.

Skripsi / Karya Ilmiah

- Fatimah, N. 2021. *Efektivitas pelayanan publik di bidang pendaftaran merek dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Rahayu, S. 2020. *Pelayanan publik berbasis digital dalam perspektif hukum administrasi negara* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum .

Sumber Internet Resmi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. *Layanan pendaftaran merek*.<https://dgip.go.id>

Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, 2025. Registrasi akun Daftar Merek.
<https://merek.dgip.go.id/daftar-online>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2024. *Data mall pelayanan publik nasional*.
<https://www.menpan.go.id/site/layanan-publik/mpp>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Penelusuran [Merek](https://sulsel.kemenkumham.go.id/),
<https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

WIPO, *About the Nice Classification*, Paris: WIPO,
<https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>

World Bank, *World Development Report, 2016, Digital Dividends* (Washington, DC: World Bank, 2016)

Wawancara

Abdul Hamid. 2026. Wawancara. 23 Januari 2026.

Andi Zaki. 2026. Wawancara. 23 Januari 2026.

Arman Jaelani. 2026. Wawancara. 1 Februari 2026.

Nurul Setiawan. 2026. Wawancara. 29 Januari 2026.

Rezki. 2026. Wawancara. 23 Januari 2026.

Sukmawati. 2026. Wawancara. 23 Januari 2026.

Teguh Firmanto. 2026. Wawancara. 29 Januari 2026.